BPR KMI
KREDIT MANDIRI INDONESIA

PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA

TATA KELOLA 2023

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Andy
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memimpin dan mengurus BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR KMI untuk kepentingan BPR KMI c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris; d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; e. Melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi f. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya; h. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan produk-produk funding dan memastikan bahwa pengembangan serta penawaran tersebut merupakan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. i. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. j. Mengawasi kelancaran kegiatan BPR KMI sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Mengungkapkan kepada karyawan Kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan yang dapat diakses seluruh karyawan, Website BPR KMI, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi melalui sarana yang diketahui atau diakses oleh Karyawan.		

2.	Nama	:	Darwhin Sinarta
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. b. Melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan d. Memantau dan menjaga kepatuhan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. e. Mengembangkan organisasi kerja Compliance sehingga PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki kebijakan, prosedur dan metode yang handal. f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan prinsip- prinsip good corporate governance. g. Memonitor kepatuhan dan pelaksanaan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi Compliance h. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan strategi Digital Banking & Technology PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia, konsolidasi komunikasi dan program program untuk peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. i. Memimpin dan mengkoordinasi pengaturan Digital Banking & Technology dengan memperhatikan kebijakan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dan prinsip kehati-hatian. j. Mengembangkan Information Technology untuk bekerja sebagai mitra dengan seluruh unit kerja dan memastikan bahwa PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia telah mempunyai teknologi yang paling tepat Perencanaan teknologi informasi yang efektif dan efsien, pengembangan, pencapaian, pengimplementasian, pemeliharaan dan dukungan yang berkelanjutan.		

3.	Nama	:	Suhendra
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memimpin dan mengurus BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR KMI untuk kepentingan BPR KMI c. Bertanggung jawab dalam seluruh proses operasional d. Menyusun strategi agar target perusahaan bisa tercapai e. Melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan terkait operasional perusahaan f. Membuat rencana, mengambil keputusan, dan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan g. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap karyawan menjalankan tugas dengan baik h. Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan BPR KMI i. Bertanggung jawab membuat laporan keuangan BPR KMI j. Mengawasi laporan keuangan BPR KMI k. Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan BPR KMI l. Meminimalisir resiko keuangan yang mungkin merugikan perusahaan m. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain o. Melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi p. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan di bidang keuangan BPR KMI. q. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan unit kerja di bidang keuangan,serta berkoordinasi dengan Direktur lainnya		

4.	Nama	:	Jemmy ST
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memimpin dan mengurus BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR KMI untuk kepentingan BPR KMI c. Bertanggung jawab atas penyaluran dana ke masyarakat d. Bertanggung jawab atas pengaduan, penaaganan dan penyelesaian keluhan nasabah e. Melaporkan perkembangan secara berkala perkembangan perkreditan secara keseluruhan f. Melaporkan perkembangan secara berkala perkembangan kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur tertentu. g. Menindaklanjuti temuan-temuan perkreditan dan lainnya yang disampaikan OJK h. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan perkembangan kondisi eksternal secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi BPR KMI i. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; j. Melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi k. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya; m. Menyusun strategi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tujuan promosi perusahaan. Melakukan identifkasi, pada pengembangan serta evaluasi terhadap strategi pemasaran yang sudah dijalankan berdasarkan dengan visi misi perusahaan		

5.	Nama	:	Lukman Nelam
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memimpin dan mengurus BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR KMI untuk kepentingan BPR KMI c. Menyusun dan membuat startegi dalam pengembangan penanganan dan penyelesaian kredit asset perusahaan. d. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris; e. Melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi f. Menyusun kebijakan dan pedoman peneraman manajemen risiko g. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi h. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan manajemen risiko i. Memastikan fungsi manajemen risiko telah dilakukan secara independen. j. Bertanggung jawab atas pelaksanaa kebijakan manajemen risiko yang diambil BPR KMI secara keseluruhan. k. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya; l. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Mengungkapkan kepada karyawan Kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan yang dapat diakses seluruh karyawan,website BPR KMI, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan.		

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
1. Pencapaian target asset di Desember 2023 dibanding dengan realisasi Desember 2023 ada penurunan sebesar Rp. 54.895.278.885,- atau 92,52%. 2. Target Oustanding Kredit mencapai 92,63% atau Rp. 519.961.802.996,- dari target sebesar Rp. 561.319.442.825,- 3. Realisasi pencapaian laba di Desember 2023 mencapai Rp. 28.522.821.915 atau 102,91% dari target Rp. 27.717.039.640,- 4. Meningkatkan kualitas produk dana pelayanan terhadap masyarakat serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan lebih dipercaya oleh masyarakat luas. 5. Secara kualitas saat ini kredit restruktur masih terjaga dan langkah dari perusahaan akan melakukan monitor lebih ketat terkait debitur - debitur ini . 6. Total Asset yang sudah ada di BPR KMI agar tetap di jaga dan terus bertumbuh.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Melvin Wangkar
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR KMI, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR KMI d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. e. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR KMI. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7 tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. g. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris. i. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. j. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan		

2.	Nama	:	Handoko Kuarso
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR KMI dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR KMI d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia e. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR KMI. f. Menilai kecukupan fungsi audit intern BPR KMI, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku g. Mengkaji dan evaluasi atas kecukupan dari fungsi Audit Intern BPR KMI, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan berikut anggarannya dan pekerjaan yang telah dilaksanakan. h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Manajemen dan Satuan Kerja Operasional/ Auditee terkait lainnya dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern. i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. j. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. k. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.		

3.	Nama	:	Rainald Okta Putra
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan b. (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisas c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait e. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif f. terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. g. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapinya. h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. i. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR KMI. j. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. k. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. l. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani anggota DewanKomisaris yang hadir.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1. Tetap menjaga kualitas kredit dan berprinsip kepada kehati-hatian dalam memberikan kredit dan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Menjaga rasio tingkat kesehatan bank 3. Total Asset yang sudah ada di PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia agar tetap di jaga dan terus bertumbuh.			

Bisnis :
1. Penyebaran penggunaan Kredit harus tetap dijaga agar sesuai dengan perkembangan ekonomi pasar dan risiko tetap terjaga

Operasional :
1. Proses digitalisasi operasional harus terus ditingkatkan, sehingga kedepan satuan kerja operasinal dapat lebih effektif dan effisien dalam bekerja.
2. Peningkatan fungsi kontrol dalam kegiatan operasional perbankan (seperti : proses keluar masuk jaminan dari custodian)

Human Capital :
1. Peningkatan kualitas SDM dengan diperbanyak aktifitas Training baik secara in house maupun dari pihak ekternal, guna pengembangan SDM yang lebih baik.
2. Training tentang APU-PPT dan PPSPM kepada seluruh karyawan yang belum mendapatkan pelatihan

Management Risiko :
1. Manajemen Risiko lebih menilai secara keseluruhan dari 6 risiko (Kredit, Operasional, Likuiditas, Kepatuhan, Reputasi, dan Stratejik).
2. Mempunyai warning terhadap bagian mana saja yang perlu di perbaiki.
3. Tetap menjaga kualitas kredit dan berprinsip kepada kehati-hatian dalam memberikan kredit.

Kepatuhan :
1. Dari sisi kepatuhan lebih masip lagi dalam penerapan APU/PPT, Anti Fraud dan Pencegahan Terorisme.
2. Kegiatan literasi dan inklusi keuangan di tahun mendatang agar lebih ditingkatkan agar masyarakat daerah mengenal BPR KMI.
3. Memberikan pelatihan kepada setiap karyawan mengenai dari level Staf sampai Pimpinan Cabang/Pimpinan Kas.
4. Tetap menjaga kualitas kredit dan berprinsip kepada kehati-hatian dalam memberikan kredit dan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Menjaga Rasio Tingkat Kesehatan Bank (TKS).

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Audit b. Merumuskan kebijakan Audit Perusahaan, termasuk spesifkasi Audit. c. Memastikan bahwa kebijakan Audit Perusahaan sesuai dengan regulasi terkait dengan Audit d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan Audit e. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia f. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee i. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal j. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan dan l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan

2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko b. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan c. Merumuskan kebijakan manajemen risiko perusahaan, termasuk spesifikasi risk appetite /risk tolerance. d. Memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan regulasi terkait dengan manajemen risiko dan permodalan yang berlaku e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait risk appetite f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. g. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan: 1) evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; 2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Manajemen Risiko; 3) Review laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan litigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian/seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik.

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1) Struktur Remunerasi; 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan 3) Besaran atas Remunerasi; b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris. c. Dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan remunerasi Komite wajib memperhatikan : 1) Kinerja keuangan 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Prestasi kerja individual; 4) Kewajaran dengan peer group; dan 5) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komit	
Komite yang ada di BPR KMI akan selalu memperhatikan kebijakan dan prosedur serta hasil laporan dari masing- masing bagian serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan- perbaikan yang akan dilakukan kedepannya dan Komite akan melaksanakan juga rapat pada masing-masing komite.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Handoko Kuarso	Akuntansi	1. Ketua (Komite Audit) 2. Ketua (Komite Remunerasi)	iya
2.	Alkie Samuel Sutandra	Akuntansi	1. Anggota (Komite Audit) 2. Anggota (Komite Pemantau Resiko)	iya
3.	Ong Tek Tjan	Akuntansi	1. Anggota (Komite Audit) 2. Anggota (Komite Pemantau Resiko)	iya
4.	Rainald Okta Putra	Akuntansi	Ketua (Komite Pemantau Resiko)	iya
5.	Melvin Wangkar	Manajemen	Anggota (Komite Remunerasi)	Tidak
6.	Ho Lioeng Min	Hukum	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	iya
7.	Ikhlas Jefri	Human Capital	Anggota (Komite Remunerasi)	iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Masing- masing di setiap komite akan menjalankan fungsinya dan melakukan rapat secara berkala.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	1. Untuk Pemeriksaan Pembukaan Blokir Rekening Tabungan Debitur akan dijadikan sebagai Objek Pemeriksaan Audit Reguler 2. Sosialisasi Anti Fraud 3. Pembentukan Unit Anti Fraud Manajemen 4. Penyusunan Kerangka Kerja SKAI Semester I Tahun 2024
	Realisasi	:	1. Pemeriksaan Pembukaan Blokir Rekening Tabungan Debitur telah dijadikan sebagai Objek Pemeriksaan Audit Reguler 2. Sosialisasi Anti Fraud 3. Telah di bentuknya Unit Desk Audit and Anti Fraud pada Departemen SKAI 4. Penyusunan Rencana Kerja SKAI Semester I Tahun 2024
	Jumlah Rapat	:	5
2.	Komite Pemantau Risiko	:	

	Program		1. Menilai efektivitas manajemen risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait risk appetite 2. Kebijakan Perubahan Pengajuan dan mekanisme kredit restruktur covid-19 3. 3. BPR Kredit Mandiri Indonesia tetap melakukan penyesuaian kualitas kredit kepada debitur restruktur yang dinilai tidak mampu betahan sehingga dapat mempercepat penyelesaian kredit dan mengantisipasi jika POJK no. 18/2021 mengenai batas akhir penerapan kebijakan dampak covid-19 terhadap Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 31 Maret 2023 tidak diperpanjang
	Realisasi	:	1. Efektivitas manajemen risiko serta rekomendasi 2. Pengajuan kredit restruktur covid 19 terakhir pada bulan September 2022 3. PT BPR Kredit Mandiri Indonesia Melakukan penyesuaian kredit restruktur pada bulan agustus 2022 kepada 34 debitur yang nilai tidak mampu bertahan penilaian kualitas kredit mengacu pada POJK No.33/ Tahun 2018 berdasarkan ketepatan pembayaran
	Jumlah Rapat	:	4
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	1. Job Grading 2024 2. MOP (Motorcycle Ownership Program) 3. Performance Management System

	Realisasi	:	1. Penyusunan Rank baru karyawan, Tunjangan dan Benefit. 2. Benefit kepemilikan Motor untuk karyawan sesuai ketentuan. 3. Penilaian kinerja, pembekalan berupa pelatihan, penempatan dan promosi karyawan.
	Jumlah Rapat	:	4
Penjelasan Lebih Lanjut			

1. Program Komite Audit :
   a. Pemeriksaan pembukaan blokir rekening tabungan debitur sebelumnya di lakukan saat pemeriksaan audit khusus
   b. Agar di sosialisasikan secara berkelanjutan mengenai edukasi dan langkah - langkah dalam pencegahan fraud
   c. Dengan adanya Unit Anti Fraud Manajemen diharapkan agar lebih fokus dalam upaya pencegahan terhadap indikasi fraud
   d. Untuk rencana kerja SKAI agar disusun lebih terperinci dan efektif untuk dapat melakukan audit tata kelola yang lebih baik
2. Program Komite Pemantau Risiko :
   a. Menilai efektivitas manajemen risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait risk appetite
   b. Kebijakan Perubahan Pengajuan dan mekanisme kredit restruktur covid-19
   c. BPR Kredit Mandiri Indonesia tetap melakukan penyesuaian kualitas kredit kepada debitur restruktur yang dinilai tidak mampu betahan sehingga dapat mempercepat penyelesaian kredit dan mengantisipasi jika POJK no. 18/2021 mengenai batas akhir penerapan kebijakan dampak covid-19 terhadap Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 31 Maret 2023 tidak diperpanjang
3. Program Komite Remunarasi dan Nominasi :
   a. Struktur Kepangkatan/Job Grading
      a) Job Grade adalah nilai dari suatu jabatan/posisi berdasarkan hasil analisa dan evaluasi suatu jabatan.
      b) Personal Grade adalah tingkat kesesuaian kompetensi karyawan terhadap standar kompetensi pekerjaan yang dibutuhkan untuk jabatan/posisi tertentu.
   b. Personal Grade diukur dari point 1 sampai 4, dimana 1 untuk karyawan baru, 2 untuk karyawan tetap, sementara untuk point 3 dan 4 untuk karyawan yang disiapkan untuk talent management (Promosi).
   c. Program Motorcycle Ownership Program (MOP) diberikan untuk karyawan tetap level Supervisor (Masa Kerja 3 Tahun), Manager up (Masa Kerja 3 Tahun).
   d. Performance Management System merupakan program yang dijalankan oleh Compensation & Benefit Unit (Human Capital) dalam menyusun dan melaporkan KPI berdasarkan fungsi kerja masing- masing posisi bedasarkan rank karyawan

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Nominal(Rp)	Persentase Kepimilikan
1.	Andy	Rp. 151.300.000	0.2%
2.	Darwhin Sinarta	Rp. 0	0%
3.	Suhendra	Rp. 0	0%
4.	Jemmy ST	Rp. 0	0%
5.	Lukman Nelam	Rp. 0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Salah satu anggota direksi memiliki saham di BPR Kredit Mandiri Indonesia			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepimilikan
1.	Lukman Nelam	-	Esta Kapital Fintek	1%
2.	Lukman Nelam	-	Esta Digital Niaga	0.71%
3.	Lukman Nelam	600930	PT. BPR Benua Kraksaan/PT BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	1%
4.	Andy	601911	PT BPR Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera	0.19%
5.	Andy	600930	PT. BPR Benua Kraksaan/PT BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	1%
6.	Suhendra	600930	PT. BPR Benua Kraksaan/PT BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	1%
7.	Jemmy	600930	PT. BPR Benua Kraksaan/PT BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	0.75%
8.	Darwhin Sinarta	600930	PT. BPR Benua Kraksaan/PT BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	0.75%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Semua anggota direksi memiliki saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Andy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Darwhin Sinarta	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Suhendra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Jemmy ST	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Lukman Nelam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan keuangan anggota direksi pada BPR tidak ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Andy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Darwhin Sinarta	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Suhendra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Jemmy ST	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Lukman Nelam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan keluarga anggota direksi pada BPR tidak ada				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Nominal(Rp)	Persentase Kepimilikan
1.	Melvin Wangkar	Rp5.292.100.000	6.9%
2.	Handoko Kuarso	Rp0	0%
3.	Rainald Okta Putra	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Salah satu Dewan Komisaris memiliki saham di BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepimilikan
1.	Melvin Wangkar	602660	PT BPR Cipta Cemerlang Indonesia	24.55%
2.	Melvin Wangkar	601911	PT. BPR Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera	6.67%
3.	Melvin Wangkar	600930	PT. BPR Benua Kraksaan/PT BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	6,91%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu dewan komisaris memiliki saham di perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Melvin Wangkar	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Orang Tua
2.	Handoko Kuarso	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Rainald Okta Putra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Melvin Wangkar	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Orang Tua
2.	Handoko Kuarso	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Rainald Okta Putra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	5	Rp 258.000.000,00	3	Rp 77.500.000,00
2	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3	Tantiem	5	Rp 1.807.000.000,00	3	Rp 527.000.000,00
4	Kompensasi berbasis saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5	Remunerasi lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp 2.065.000.000,00		Rp 604.500.000,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Operasional (5)	Mobil Operasional (2)
3	Asuransi Kesehatan	Manulife (5)	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b) :1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7.8 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.8 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.8 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3.2 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27 Januari 2023	3	1. Laporan Keuangan Periode Desember 2022 2. Laporan Restrukturisasi Periode Desember 2022 (Konsolidasi)
2.	07 Februari 2023	3	1. Laporan RBB 2023 dapat dilaksanakan dengan maksimal 2. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar 3. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru
3.	28 April 2023	3	1. Laporan Keuangan Periode Maret 2023 2. Laporan Restrukturisasi Periode Maret 2023
4.	17 Juli 2023	3	1. Laporan Keuangan Periode Juni 2023 vs Maret 2023. 2. Laporan Restrukturisasi Periode Juni 2023 vs Maret 2023. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
5.	24 Oktober 2023	3	1. Laporan Keuangan Periode Juni 2023 & September 2023. 2. Laporan Restrukturisasi Periode Juni 2023 & September 2023. 3. Rangkuman Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023 4. Logo Baru PT BPR Kredit Mandiri Indonesia.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Melvin Wangkar	5	0	100%
2.	Handoko Kuarso	5	0	100%
3.	Rainald Okta Putra	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	10	12	10	41
Telah Diselesaikan		0		0		11		40
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		1		1
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Jumlah Penyimpangan Internal Tahun 2023								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	5	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :		
Permasalahan Hukum yang Dihadapi tahun 2023		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	Suhendra	Direktur	Sewa Ruko	75 juta rupiah	Plaza Sudirman Center Blok A.12 . Jl raya Sudirman Desa Pucung Kec. Kota Baru, Karawang
2.	Yeti Sopandi	Istri Pemilik	Suhendra	Direktur	Sewa Ruko	106 juta rupiah	Jl. Letjend Ibrahim Adji No. 159 Loji – Bogor
3.	Melvin Wangkar &Melivia Wangkar	Komisaris Utama & Anak Pemilik	Suhendra	Direktur	Sewa Ruko	106 juta rupiah	Jl. Major Oking No.5 Kel. Puspanegar a - Kec. Citeureup - Bogor
4.	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	Suhendra	Direktur	Sewa Ruko	90 juta rupiah	Jl. Terusan Kopo No. 341 D RT. 004 RW. 004 Kel.Margahayu Selatan - Bandung
5.	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	Suhendra	Direktur	Sewa Kendaraan	188,2 juta rupiah/bulan	Sewa 20 unit kendaraan
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	Jumlah (Rp)
1.	20 Januari 2023	Sosial	Pemungutan sampah plastik di laut untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan	Komunitas Plastik & Masyarakat	Rp.57.000.000
2.	16 Februari 2023	Sosial	Pemberian edukasi serta mengenai produk dan layanan BPR dan perluasan akses untuk BPR melalui kegiatan Edukasi Literasi Keuangan 2023	UMKM, Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat Umum	Rp. 3.000.000

3.	18 April 2023	Sosial	Dalam bulan Ramadhan KMI memberikan beberapa bingkisan ke warga yang membutuhkan sebagai bentuk sosial , acara ini di sebut KMI Ramadhan Berbagi	Masyarakat Umum	Rp. 5.000.000
4.	22 Oktober 2023	Sosial	Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023, kegiatan perluasan akses kantor melalui sosialisasi secara masyarakat di CFD Bekasi.	Masyarakat Umum	Rp. 6.000.000
5.	28 November 2023	Sosial	Kegiatan tanam pohon dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dalam polusi udara, maka dari itu BPR Kredit Mandiri Indonesia membuat KMI Menanam Pohon untuk Indonesia	Pemerintah Kabupaten Majalengka	Rp. 5.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Kegiatan Sosial PT BPR Kredit Mandiri Indonesia Tahun 2023					